

Analisis Solvabilitas Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2022

Solvency Analysis of Regency/City Budgets in South Sumatra Province for Fiscal Year 2016-2022

Muhammad Irfandhia Nugraha¹, Nelly Masnila², Desi Indriasari³
Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: irfandhian07@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the solvency of the budget at the Regency and City Governments in the Province of South Sumatra. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. Secondary data in the form of Financial Statements to be analyzed is the Budget Realization Report for Regencies and Cities in South Sumatra Province for the 2016-2020 Fiscal Year. The budget solvency analysis uses the calculation of the budget solvency ratio, the budget solvency ratio index, and the budget solvency dimension index which are the final results to determine the budget solvency value. Based on the results of the analysis, it is known that the budget solvency in the districts and cities in South Sumatra Province shows quite good results, where within 5 years all districts and cities in South Sumatra Province have passed the indicator of the local government financial health value for budget solvency by showing an average increasing every year, although in 2020 it decreased again due to the covid-19 pandemic.

Keywords: Public Sector, Financial Report, Budget Solvency Analysis

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui solvabilitas anggaran pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data sekunder dalam bentuk Laporan Keuangan yang akan dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020. Analisis solvabilitas anggaran menggunakan perhitungan rasio solvabilitas anggaran, indeks rasio solvabilitas anggaran, dan indeks dimensi solvabilitas anggaran yang menjadi hasil akhir untuk menentukan nilai solvabilitas anggaran. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa solvabilitas anggaran pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana dalam kurun waktu 5 tahun seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah melewati indikator nilai kesehatan keuangan PEMDA untuk solvabilitas anggaran dengan menunjukkan rata-rata tiap tahun meningkat, walaupun di tahun 2020 kembali menurun dikarenakan pandemi covid-19.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Sektor Publik, Analisis Solvabilitas Anggaran

PENDAHULUAN

Laporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi yang berarti tentang posisi keuangan dan transaksi entitas pelapor untuk periode pelaporan. Nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan bisnis pemerintah dapat ditentukan dengan menggunakan laporan keuangan, seperti halnya situasi keuangan, kemandirian dan efisiensi organisasi pelapor, dan tingkat kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Laporan keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh PP/No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berisi informasi tentang status dan transaksi keuangan organisasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi standar laporan keuangan antara lain relevansi, ketergantungan, komparabilitas, dan kelengkapan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan bantuan dengan analisis laporan keuangan ketika mencoba untuk menerjemahkan informasi dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu dalam pemahaman, interpretasi, dan evaluasi laporan keuangan (Mahmudi 2016: 13).

Menurut Mahmudi (2016), analisis laporan keuangan yaitu aktivitas membaca laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan, dan temuannya akan digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Menurut Harahap (2013) analisis keuangan merupakan upaya untuk menentukan karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan. Analisis angka-angka keuangan utama dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil kinerja dari satu periode yang sudah berjalan ke periode yang selanjutnya, sehingga dapat terlihat adanya peningkatan kinerja atau tidak dari tahun ke tahun. Maka dari itu, harus adanya ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan untuk dapat berjalan lancar proses analisis dan evaluasinya.

Menurut Mahmudi (2016: 88), mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan atau lembaga menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis varians, analisis indikator keuangan, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediktif. Masih kurangnya informasi pendapatan di sektor publik terhadap angka-angka perhitungan keuangan terutama di sektor korporasi yang tak bisa diterapkan di sektor publik. Tetapi, masih layak untuk memeriksa indikator keuangan yang digunakan baik oleh sektor komersial maupun publik, seperti penilaian solvabilitas dan likuiditas (Mahmudi, 2016: 105).

Rasio keuangan dianalisis menggunakan analisis solvabilitas anggaran dalam penelitian ini. Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan uang untuk mendanai kegiatan mereka selama siklus anggaran fiskal ditunjukkan oleh analisis solvabilitas anggaran (Nollenberger *et al.*: 2003). Akibatnya, pembilang dan penyebut dari indikator dimensi ini harus mencerminkan keseimbangan jangka panjang antara pendapatan normal pemerintah daerah dan biaya operasional. Ada rasio yang digunakan untuk menilai keterampilan ini. Karena itu, semakin banyak uang yang tersedia untuk biaya operasional pemerintah daerah, semakin tinggi persentasenya. Akibatnya, peningkatan nilai rasio menandakan bahwa solvabilitas anggaran telah membaik.

Menurut Noor Anisyah dan Syahrani (2022) selama ini analisis rasio solvabilitas lebih banyak diterapkan pada perusahaan. Dalam penelitian ini penulis akan menerapkan pada pemerintahan daerah. UU/No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Seluruh kabupaten dan kota yang termasuk dalam penelitian ini berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelum ini, tidak ada pemerintah kota yang melakukan analisis keuangan secara teratur. Daerah dan kota di Sumatera Selatan, seperti banyak daerah lain di tanah air, kurang memperhatikan keadaan keuangan daerahnya. Untuk lebih jelasnya, penilaian BPK terhadap kinerja keuangan dalam hal kepatuhan prosedur

dibandingkan dengan penganggaran bukan hanya penilaian akuntabilitas. Menurut BPK, kondisi keuangan daerah tidak seburuk kelihatannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2016-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

UU/No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Standar akuntansi, sebagaimana dituangkan dalam PP/No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menggambarkan laporan keuangan sebagai akun yang terorganisir dari status keuangan dan transaksi entitas pelapor. Pemangku kepentingan dapat menggunakan data keuangan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi (Mahmudi 2016: 13).

Berdasarkan PP/No. 71/2010 paragraf 28 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang ada pada satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Ketika membuat keputusan ekonomi, sosial, atau politik, analisis laporan keuangan bergantung pada hasil evaluasi angka-angka yang termasuk dalam laporan keuangan (Mahmudi, 2016: 89). Menganalisis laporan keuangan memerlukan penggunaan berbagai teknik dan prosedur analitis untuk menentukan ukuran dan hubungan relatif di antara berbagai komponen. Analisis seharusnya mengurangi atau menghapus penilaian seperti dugaan, ketidakpastian, dan preferensi pribadi.

Latar belakang perlunya dilakukan analisis atas laporan keuangan menurut Permenkeu RI Nomor 263/PMK.05/2014, ialah:

1. Kompleksitas Laporan Keuangan (termasuk lampiran) tak mencapai standar berdasarlam ketentuan;
2. Ada perbedaan antara data yang disajikan dalam hardcopy/softcopy, dan CaLK;
3. Pengungkapan dalam CaLK seringkali kurang informatif.

Tujuan analisis laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas harus disediakan serta informasi tentang perubahan posisi tersebut, menyediakan informasi tentang sumber alokasi keuangan untuk penggunaan sumber daya ekonomi, memberikan

informasi tentang pencapaian anggaran dan bagaimana kegiatan entitas pelapor didanai, dan memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya. (Fraud, 2016:15).

Solvabilitas Anggaran

Kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan dalam mendanai kegiatannya selama periode anggaran fiskal disebut sebagai "Solvabilitas Anggaran" (Nollenberger *et al.*: 2003). Akibatnya, pembilang dan penyebut dari indikator dimensi ini harus mencerminkan keseimbangan jangka panjang antara pendapatan normal pemerintah daerah dan biaya operasional. Rasio berikut dapat digunakan untuk menilai keahlian ini.

Tabel 1
Rasio-rasio Solvabilitas Anggaran

| |
|---|
| Rasio A = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / (\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})$ |
| Rasio B = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / \text{Belanja Operasional}$ |
| Rasio C = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / \text{Belanja Pegawai}$ |
| Rasio D = $\text{Total pendapatan} / \text{Total Belanja}$ |

Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan PEMDA oleh Irwan Taufiq Ritonga, 2014

Karena itu, semakin banyak uang yang tersedia untuk biaya operasional pemerintah daerah, semakin tinggi persentasenya. Akibatnya, peningkatan nilai rasio menandakan bahwa solvabilitas anggaran telah membaik. Adapun indikator nilai kesehatan keuangan PEMDA untuk analisis solvabilitas anggaran adalah 0,142 (Ritonga; 2014).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Satu atau lebih variabel bebas (independen variabel) dapat dipakai pada penelitian deskriptif untuk mengidentifikasi nilai variabel tanpa membandingkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 2019 :59).

Populasi dan Sampel

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan menjadi populasi pada penelitian ini. Karena penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, semua anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Jika dilihat dari sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melalui laman <http://sumsel.bpk.go.id>.

Teknik Analisis Data

Data yang akan dianalisis adalah laporan keuangan berupa LRA Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2020 didapat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan lewat laman <http://sumsel.bpk.go.id>.

Perhitungan Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran

Untuk menentukan hasil solvabilitas anggaran, perlu menghitung indeks solvabilitas anggaran yang menjadi hasil dari nilai solvabilitas anggaran. Tujuan perhitungan indeks dimensi solvabilitas anggaran untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menutupi belanja operasionalnya. Semakin besar hasil nilai dari perhitungan indeks dimensi solvabilitas anggaran, menandakan Pemda mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menutupi belanja operasionalnya. Nilai indikator kesehatan keuangan untuk solvabilitas anggaran menurut Ritonga (2014) adalah 0,142.

Adapun tahapan-tahapan dalam menghitung indeks dimensi solvabilitas anggaran dibagi menjadi tiga tahap diantaranya:

Tahap 1: Menghitung Rasio-rasio Solvabilitas Anggaran

Untuk menghitung rasio solvabilitas anggaran, akun keuangan yang diaudit digunakan. Rasio-rasio solvabilitas anggaran dikelompokkan menjadi 4 rasio, setiap rasio memiliki perhitungan yang berbeda.

| |
|--|
| $\text{Rasio A} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{(\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})}$ |
| $\text{Rasio B} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Belanja Operasional}}$ |
| $\text{Rasio C} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Belanja Pegawai}}$ |
| $\text{Rasio D} = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$ |

Total penerimaan APBD berkurang karena dana APBD tidak berulang dan tidak berada dalam kendali pemerintah daerah. Dalam hal rasio A, seluruh pengeluaran dikurangi dari belanja modal, karena tidak termasuk dalam lingkup operasi pemerintah daerah. Saat menghitung rasio C, biaya pegawai digunakan sebagai penyebut karena merupakan sebagian besar biaya operasional.

Tahap 2: Menghitung Indeks Rasio

Setelah menghitung rasio-rasio solvabilitas anggaran, selanjutnya adalah menghitung indeks rasio. Menghitung indeks setiap rasio dengan rumus:

$$\text{Indeks Rasio}_n = (\text{Nilai Aktual}_n - \text{Nilai Terendah}) / (\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah})$$

Keterangan:

- Indeks Rasio_n = tahun anggaran
Nilai Aktual_n = nilai Rasio tahun anggaran
Nilai Tertinggi = nilai rasio paling besar
Nilai Terendah = nilai rasio paling kecil

Nilai pengamatan terkecil sepanjang waktu pengamatan adalah nilai terkecil. Nilai dengan nilai nyata tertinggi adalah nilai dengan data yang paling banyak diamati selama periode pengamatan. Akibatnya, nilai maksimum indeks adalah 1 dan nilai minimumnya adalah 0. Sekali setahun, nilai terendah dan maksimum dihitung.

Tahap 3: Menghitung Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran

Setelah selesai dan mendapatkan hasil dari perhitungan indeks rasio, tahap selanjutnya adalah menghitung indeks dimensi. Rata-rata aritmatika dari indeks rasio yang membentuk indeks dimensi. Diasumsikan oleh Ritonga (2014) bahwa setiap indeks indikator memiliki bobot yang sama dalam hal kepentingan. Rerata aritmatika indeks rasio solvabilitas anggaran digunakan untuk menghitung indeks dimensi solvabilitas anggaran. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$(\text{Indeks Rasio A} + \text{Indeks Rasio B} + \text{Indeks Rasio C} + \text{Indeks Rasio D}) / 4$$

Keterangan:

- Indeks Rasio A = indeks rasio A tahun anggaran
Indeks Rasio B = indeks rasio B tahun anggaran
Indeks Rasio C = indeks rasio C tahun anggaran
Indeks Rasio D = indeks rasio D tahun anggaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai solvabilitas anggaran terhadap setiap Kabupaten dan Kota tersebut dibahas satu per satu sebagai berikut.

Rasio Solvabilitas Anggaran

Rasio solvabilitas anggaran terdiri dari 4 rasio diantaranya Rasio A, Rasio B, Rasio C, dan Rasio D. Untuk Rasio A dihitung dengan rumus (Total Pendapatan-Pendapatan DAK)/(Total Belanja-Belanja Modal), Rasio B dihitung dengan rumus (Total Pendapatan-Pendapatan DAK)/Belanja Operasional, Rasio C dihitung dengan rumus (Total Pendapatan -Pendapatan DAK)/Belanja Pegawai, dan Rasio D dihitung dengan rumus Total pendapatan/Total Belanja. Berikut disajikan rekapitulasi solvabilitas anggaran

| KAB/KOTA | Rekapitulasi Rasio Solvabilitas Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| | RASIO A | | | | | RASIO B | | | | | RASIO C | | | | | RASIO D | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Banyuasin | 1,28 | 1,29 | 1,43 | 1,45 | 1,35 | 1,28 | 1,29 | 1,43 | 1,45 | 1,42 | 2,15 | 2,40 | 2,75 | 2,85 | 2,69 | 1,22 | 1,23 | 1,28 | 1,22 | 1,04 |
| Empat Lawang | 1,49 | 1,45 | 1,39 | 1,53 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,39 | 1,53 | 1,58 | 2,56 | 2,82 | 2,93 | 3,22 | 3,28 | 1,24 | 1,25 | 1,20 | 1,23 | 1,21 |
| Lahat | 1,38 | 1,47 | 1,53 | 1,68 | 1,47 | 1,38 | 1,47 | 1,53 | 1,69 | 1,52 | 2,34 | 2,42 | 2,65 | 3,10 | 2,71 | 1,12 | 1,25 | 1,35 | 1,44 | 1,25 |
| Muara Enim | 1,43 | 1,57 | 1,56 | 1,71 | 1,45 | 1,43 | 1,58 | 1,56 | 1,71 | 1,48 | 2,53 | 2,99 | 3,10 | 3,69 | 2,95 | 1,10 | 1,27 | 1,25 | 1,21 | 1,18 |
| Musi Banyuasin | 1,45 | 1,48 | 1,63 | 1,77 | 1,51 | 1,45 | 1,48 | 1,63 | 1,77 | 1,51 | 2,63 | 3,00 | 3,37 | 4,24 | 4,94 | 1,16 | 1,13 | 1,18 | 1,25 | 1,21 |
| Musi Rawas Utara | 1,79 | 1,76 | 1,94 | 1,82 | 1,59 | 1,79 | 1,76 | 1,94 | 1,82 | 1,66 | 4,41 | 4,55 | 5,24 | 4,73 | 4,03 | 1,13 | 1,16 | 1,24 | 1,11 | 1,12 |
| Musi Rawas | 1,16 | 1,56 | 1,46 | 1,50 | 1,32 | 1,16 | 1,56 | 1,46 | 1,50 | 1,32 | 2,25 | 2,66 | 2,69 | 2,81 | 2,50 | 1,06 | 1,30 | 1,28 | 1,24 | 1,14 |
| Ogan Ilir | 1,22 | 1,46 | 1,43 | 1,55 | 1,38 | 1,22 | 1,46 | 1,43 | 1,55 | 1,47 | 1,97 | 2,34 | 2,45 | 2,74 | 2,60 | 1,13 | 1,22 | 1,29 | 1,27 | 1,18 |
| OKI | 1,19 | 1,11 | 1,15 | 1,22 | 1,06 | 1,25 | 1,46 | 1,51 | 1,33 | 1,20 | 2,33 | 2,33 | 2,38 | 2,69 | 2,52 | 1,00 | 1,01 | 1,16 | 1,04 | 0,90 |
| OKU Selatan | 1,49 | 1,51 | 1,60 | 1,55 | 1,56 | 1,49 | 1,51 | 1,60 | 1,55 | 1,58 | 2,23 | 2,67 | 2,71 | 2,84 | 2,88 | 1,12 | 1,24 | 1,27 | 1,20 | 1,29 |
| OKU Timur | 1,24 | 1,37 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | 1,24 | 1,37 | 1,33 | 1,42 | 1,59 | 1,86 | 2,26 | 2,13 | 2,41 | 2,70 | 1,18 | 1,24 | 1,25 | 1,15 | 1,29 |
| OKU | 1,28 | 1,40 | 1,38 | 1,46 | 1,21 | 1,28 | 1,40 | 1,38 | 1,46 | 1,22 | 1,86 | 2,40 | 2,44 | 2,66 | 2,10 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 1,10 |
| PALI | 1,28 | 1,40 | 1,38 | 1,46 | 1,21 | 1,28 | 1,40 | 1,38 | 1,46 | 1,22 | 1,86 | 2,40 | 2,44 | 2,66 | 2,10 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,22 | 1,10 |
| Lubuk Linggau | 1,76 | 1,94 | 1,83 | 2,01 | 1,48 | 1,76 | 1,94 | 1,83 | 2,01 | 1,49 | 4,44 | 6,50 | 6,49 | 6,85 | 5,06 | 1,08 | 1,15 | 1,01 | 1,04 | 1,12 |
| Pagar Alam | 1,24 | 1,16 | 1,16 | 1,25 | 1,37 | 1,24 | 1,16 | 1,16 | 1,26 | 1,39 | 2,19 | 2,20 | 2,29 | 2,60 | 2,71 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,04 | 1,06 |
| Palembang | 1,17 | 1,31 | 1,14 | 1,26 | 1,16 | 1,17 | 1,31 | 1,14 | 1,26 | 1,19 | 1,66 | 2,11 | 1,98 | 2,28 | 2,10 | 1,07 | 1,09 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| Prabumulih | 1,21 | 1,18 | 1,21 | 1,33 | 1,06 | 1,21 | 1,18 | 1,21 | 1,33 | 1,13 | 2,04 | 2,35 | 2,56 | 2,83 | 2,21 | 1,07 | 1,06 | 1,16 | 1,06 | 0,95 |

Gambar 1
Rekapitulasi Solvabilitas Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tingkat solvabilitas anggaran yang bervariasi. Hal ini karena pendapatan, DAK, total belanja, belanja modal, belanja operasional, dan belanja pegawai berbeda tiap Kabupaten dan Kota setiap tahun anggaran.

Indeks Rasio Solvabilitas Anggaran

Indikator rasio solvabilitas anggaran kemudian dihitung setelah menghitung rasio solvabilitas anggaran - Nilai Terendah)/(Nilai Tertinggi - Nilai Terendah). Dibawah ini ditampilkan rekapitulasi indeks rasio solvabilitas anggaran

| KAB/KOTA | Rekapitulasi Indeks Rasio Solvabilitas Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| | INDEKS RASIO A | | | | | INDEKS RASIO B | | | | | INDEKS RASIO C | | | | | INDEKS RASIO D | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Banyuasin | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 1,00 | 0,42 | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 1,00 | 0,87 | 0,00 | 0,36 | 0,86 | 1,00 | 0,77 | 0,75 | 0,81 | 1,00 | 0,77 | 0,00 |
| Empat Lawang | 0,66 | 0,38 | 0,00 | 0,91 | 1,00 | 0,56 | 0,32 | 0,00 | 0,78 | 1,00 | 0,00 | 0,36 | 0,51 | 0,92 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,00 | 0,59 | 0,28 |
| Lahat | 0,00 | 0,29 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 1,00 | 0,46 | 0,00 | 0,11 | 0,41 | 1,00 | 0,48 | 0,00 | 0,42 | 0,74 | 1,00 | 0,43 |
| Muara Enim | 0,00 | 0,51 | 0,47 | 1,00 | 0,08 | 0,00 | 0,52 | 0,46 | 1,00 | 0,19 | 0,00 | 0,39 | 0,49 | 1,00 | 0,37 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | 0,67 | 0,48 |
| Musi Banyuasin | 0,00 | 0,09 | 0,56 | 1,00 | 0,21 | 0,00 | 0,09 | 0,56 | 1,00 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,70 | 1,00 | 0,24 | 0,00 | 0,39 | 1,00 | 0,70 |
| Musi Rawas Utara | 0,57 | 0,50 | 1,00 | 0,66 | 0,00 | 0,46 | 0,36 | 1,00 | 0,57 | 0,00 | 0,31 | 0,43 | 1,00 | 0,58 | 0,00 | 0,17 | 0,40 | 1,00 | 0,00 | 0,12 |
| Musi Rawas | 0,00 | 1,00 | 0,77 | 0,85 | 0,39 | 0,00 | 1,00 | 0,77 | 0,85 | 0,39 | 0,00 | 0,73 | 0,80 | 1,00 | 0,46 | 0,00 | 1,00 | 0,91 | 0,75 | 0,33 |
| Ogan Ilir | 0,00 | 0,73 | 0,62 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,73 | 0,65 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,48 | 0,62 | 1,00 | 0,82 | 0,00 | 0,59 | 1,00 | 0,92 | 0,34 |
| OKI | 0,80 | 0,33 | 0,56 | 1,00 | 0,00 | 0,16 | 0,85 | 1,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,00 | 0,53 | 0,38 | 0,40 | 1,00 | 0,55 | 0,00 |
| OKU Selatan | 0,00 | 0,24 | 1,00 | 0,61 | 0,66 | 0,00 | 0,23 | 1,00 | 0,61 | 0,88 | 0,00 | 0,68 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 0,00 | 0,70 | 0,93 | 0,46 | 1,00 |
| OKU Timur | 0,00 | 0,38 | 0,25 | 0,53 | 1,00 | 0,00 | 0,37 | 0,25 | 0,52 | 1,00 | 0,00 | 0,47 | 0,32 | 0,65 | 1,00 | 0,24 | 0,65 | 0,72 | 0,00 | 1,00 |
| OKU | 0,30 | 0,76 | 0,71 | 1,00 | 0,00 | 0,26 | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,73 | 1,00 | 0,31 | 0,85 | 0,65 | 0,52 | 1,00 | 0,00 |
| PALI | 0,51 | 0,87 | 0,66 | 1,00 | 0,00 | 0,52 | 0,87 | 0,65 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,85 | 1,00 | 0,26 | 0,53 | 1,00 | 0,00 | 0,17 | 0,79 |
| Lubuk Linggau | 0,00 | 1,00 | 0,31 | 0,68 | 0,94 | 0,00 | 0,72 | 0,22 | 0,49 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 0,66 | 0,75 | 1,00 | 0,58 | 1,00 | 0,47 | 0,58 | 0,00 |
| Pagar Alam | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1,00 | 0,00 | 0,02 | 0,19 | 0,79 | 1,00 | 0,00 | 0,47 | 1,00 | 0,12 | 0,29 |
| Palembang | 0,18 | 1,00 | 0,00 | 0,71 | 0,11 | 0,19 | 1,00 | 0,00 | 0,71 | 0,31 | 0,00 | 0,74 | 0,51 | 1,00 | 0,72 | 0,84 | 1,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Prabumulih | 0,54 | 0,45 | 0,57 | 1,00 | 0,00 | 0,40 | 0,28 | 0,43 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,65 | 1,00 | 0,22 | 0,59 | 0,52 | 1,00 | 0,56 | 0,00 |

Gambar 2
Rekapitulasi Indeks Rasio Solvabilitas Anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran ada kapabilitas PEMDA dalam mendapatkan pendapatan guna membiaya belanja operasionalnya. Menurut Ritonga (2014) indikator kesehatan keuangan PEMDA untuk solvabilitas anggaran adalah 0,142.

**Analisis Solvabilitas Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2022**

Muhammad Irfandhia Nugraha, Nelly Masnila, Desi Indriasari

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.205>

Indeks dimensi solvabilitas anggaran merupakan perhitungan terakhir untuk menentukan solvabilitas anggaran. Rumus perhitungan indeks dimensi solvabilitas anggaran adalah (Indeks Rasio A + Indeks Rasio B + Indeks Rasio C + Indeks Rasio D)/4. Berikut disajikan rekapitulasi indeks dimensi solvabilitas anggaran

Tabel 2

**Rekapitulasi Indeks Dimensi Solvabilitas Anggaran
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

| No. | Kabupaten / Kota | Tahun Anggaran | | | | | Rata-rata per Kabupaten/Kota |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Banyuasin | 0,19 | 0,35 | 0,92 | 0,94 | 0,34 | 0,55 |
| 2 | Empat Lawang | 0,48 | 0,52 | 0,13 | 0,80 | 0,82 | 0,55 |
| 3 | Lahat | 0,00 | 0,28 | 0,53 | 1,00 | 0,42 | 0,45 |
| 4 | Muara Enim | 0,00 | 0,61 | 0,58 | 0,92 | 0,28 | 0,48 |
| 5 | Musi Banyuasin | 0,06 | 0,09 | 0,46 | 0,92 | 0,53 | 0,41 |
| 6 | Musi Rawas Utara | 0,38 | 0,42 | 1,00 | 0,45 | 0,03 | 0,46 |
| 7 | Musi Rawas | 0,00 | 0,93 | 0,81 | 0,86 | 0,39 | 0,60 |
| 8 | Ogan Ilir | 0,00 | 0,63 | 0,72 | 0,98 | 0,60 | 0,59 |
| 9 | OKI | 0,34 | 0,40 | 0,67 | 0,74 | 0,13 | 0,46 |
| 10 | OKU Selatan | 0,00 | 0,46 | 0,92 | 0,66 | 0,88 | 0,58 |
| 11 | OKU Ulu Timur | 0,06 | 0,47 | 0,39 | 0,43 | 1,00 | 0,47 |
| 12 | Ogan Komering Ulu | 0,35 | 0,71 | 0,68 | 1,00 | 0,08 | 0,56 |
| 13 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0,39 | 0,90 | 0,54 | 0,79 | 0,26 | 0,58 |
| 14 | Lubuk Linggau | 0,15 | 0,88 | 0,41 | 0,63 | 0,74 | 0,56 |
| 15 | Pagar Alam | 0,19 | 0,12 | 0,30 | 0,45 | 0,82 | 0,38 |
| 16 | Palembang | 0,30 | 0,93 | 0,13 | 0,62 | 0,28 | 0,45 |
| 17 | Prabumulih | 0,38 | 0,41 | 0,66 | 0,89 | 0,05 | 0,48 |
| Rata-rata per tahun | | 0,19 | 0,54 | 0,58 | 0,77 | 0,45 | |

Sumber: data diolah, 2022

Hasil rekapitulasi indeks dimensi solvabilitas anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kalau rata-rata terendah untuk tiga kabupaten dan kota yaitu Kota Pagar Alam dengan nilai 0,38; Kabupaten Banyuasin dengan nilai 0,41; dan Kabupaten Lahat serta Kota Palembang dengan nilai 0,45; sedangkan untuk rata-rata tiga tertinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas dengan nilai 0,60; Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai 0,59; dan Kab OKU Selatan serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan nilai 0,58. Untuk rata-rata indeks dimensi solvabilitas anggaran per tahun dalam rentang 2016-2020, nilai terendah adalah 0,19 di tahun anggaran 2016, sedangkan untuk nilai tertinggi adalah 0,77 di tahun anggaran 2019. Hasil dari rata-rata per kabupaten/kota, dan rata-rata per tahun menyatakan kalau Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik dalam membiayai belanja operasional karena sudah melewati indikator solvabilitas anggaran.

Adapun penjelasan solvabilitas anggaran tiap-tiap kabupaten dan kota akan di uraikan sebagai berikut:

1. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Banyuasin di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Banyuasin menunjukkan hasil yang baik karena dari tahun anggaran 2016-2020 sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Hal ini menunjukkan bahwasannya Kabupaten Banyuasin memiliki pendapatan yang cukup untuk membiyai belanja operasional.
2. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Empat Lawang di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Empat Lawang menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2017 dan 2019-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 Kabupaten Empat Lawang belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,13.
3. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Lahat di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Lahat menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2017-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 Kabupaten Lahat belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,00.
4. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Muara Enim di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Muara Enim menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2017-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 Kabupaten Muara Enim belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,00.
5. Analisis solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab Musi Banyuasin di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2018-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016-2017 Kabupaten Musi Banyuasin belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,06 dan 0,09.
6. Analisis solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab Musi Rawas Utara di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2019 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 Kabupaten Musi Rawas Utara belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,03.
7. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Musi Rawas di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Musi Rawas menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2017-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun

- anggaran 2016 Kabupaten Musi Rawas belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,00.
8. Analisis solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OI di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2017-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 Kabupaten Ogan Ilir belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,00.
 9. Analisis solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKI di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKI menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2019 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 Kabupaten Ogan Ilir belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,13.
 10. Analisis solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKU Selatan di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKU Selatan menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2017-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 *Financial Statements* Kab OKU Selatan belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,00.
 11. Analisis solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKU Timur di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKU Timur menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2017-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 Kab OKU Timur belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,06.
 12. Analisis solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKU di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada *Financial Statements* Kab OKU menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2019 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 Kabupaten Kab OKU Timur tak mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,08.
 13. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kab Penukal Abab Lematang Ilir di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA.
 14. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan Kota Lubuk Linggau di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kota Lubuklinggau

menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA.

15. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan Kota Pagar Alam di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kota Pagar Alam menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016 dan 2018-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2017 Kota Pagar Alam belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,12.
16. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan Kota Palembang di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kota Palembang menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2017 dan 2019-2020 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2018 Kota Palembang belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,13.
17. Analisis solvabilitas anggaran pada laporan Kota Prabumulih di tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari indeks dimensi solvabilitas anggaran pada laporan keuangan Kota Prabumulih menunjukkan hasil yang baik untuk tahun anggaran 2016-2019 karena sudah melebihi nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 Kota Prabumulih belum mencapai nilai indikator kesehatan keuangan PEMDA dengan nilai 0,05.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan, alhasil kesimpulan pada penelitian ini yaitu solvabilitas anggaran untuk 17 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana dalam kurung waktu 5 tahun semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan sudah melewati indikator nilai kesehatan keuangan PEMDA untuk solvabilitas anggaran dengan menunjukkan rata-rata tiap tahun meningkat, walaupun di tahun 2020 kembali menurun dikarenakan pandemi covid-19. Rata-rata nilai tertinggi untuk solvabilitas anggaran yaitu 0,77 di tahun 2019 dan rata-rata nilai terendah untuk solvabilitas anggaran yaitu 0,19 di tahun 2016. Untuk kabupaten dan kota menunjukkan bahwa rata-rata terendah yaitu Kota Pagar Alam dengan nilai 0,38; sedangkan untuk rata-rata tertinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas dengan nilai 0,60.

Saran

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan, maka saran pada penelitian ini yaitu:

**Analisis Solvabilitas Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2022**

Muhammad Irfandhia Nugraha, Nelly Masnila, Desi Indriasari

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.205>

1. Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan yang sudah melewati nilai indikator solvabilitas anggaran perlu menjaga kondisi keuangannya.
2. Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan yang belum melewati nilai indikator solvabilitas anggaran perlu selalu mengalokasikan pendapatan secara optimal agar bisa mendanai biaya belanja operasional pemerintah daerah.
3. Selalu melakukan analisis pada laporan keuangan setiap tahunnya untuk mengukur apakah sudah baik atau belum dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba empat.
- Anisyah, Noor dan Syahran. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Solvabilitas dan Likuiditas di Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. *Jurnal Faud*, M. Ramli. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis kritis atas laporan keuangan* (Cetakan Ke). Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga,. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nirawati, L., Samsudin, A., Santoso, D. R., Adjie, M. Z., Naenara, S. A., Netanya, S. A., & Trisnawati, E. (2022). Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 153-166.
- Nollenberger, K., & et al. (2003). *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Governement*. Washington DC: International City County Managers Association.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yusnita, R., & Aslami, N. (2022). Strategi Pengelolaan Kepemimpinan dan Perubahan Organisasi. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 127-136.